



**Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi**



SIDALI

Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan
Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik



DAFTAR ISI

Panduan Menu

DAFTAR ISI	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL	ii
1. Panduan untuk umum	1
A. Alamat Website SIDALI	1
B. Menu Home	1
C. Menu Buat Laporan	2
D. Menu Pemantauan	6
2. Panduan untuk perguruan tinggi	8
A. Menu <i>Home/Login</i>	8
B. Menu Pemantauan	9
C. Menu Sanksi	10
1. Permohonan Keberatan	11
2. Jawaban Keberatan	15
3. Jawaban Banding	16
D. Menu Dokumen Perbaikan	17
E. Menu Pencabutan Sanksi	19
1. Permohonan	19
2. Jawaban	21
F. Buku Panduan	23
5. Daftar Pelanggaran dan Sanksi	24

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL

Sudah semestinya semua penyelenggaraan pendidikan tinggi di negeri ini memenuhi standar. Standar yang dimaksud adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada saat pendirian perguruan tinggi seharusnya memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, ada yang tidak memenuhi standar, baik sebagian kecil maupun keseluruhan poin-poin standar itu.

Terhadap perguruan tinggi yang berpotensi tidak memenuhi standar, Kementerian telah melakukan pembinaan, baik secara periodik maupun insidental. Pembinaan tersebut dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek, juga dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di wilayah masing-masing. Dengan tidak dipenuhinya standar penyelenggaraan, maka perguruan tinggi telah melakukan pelanggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, terdapat tiga kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran yang dikenai sanksi administratif ringan, pelanggaran yang dikenai sanksi administratif sedang, dan pelanggaran yang dikenai sanksi administratif berat.

Terkait dengan pelanggaran itu, sanksi yang dikenakan mulai dari sanksi administratif ringan, sedang, hingga berat yang berakibat dikenakannya teguran hingga pencabutan izin program studi dan/atau institusi perguruan tinggi.

Adapun dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara dapat berasal dari (a) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri; (b) hasil pemantauan dan evaluasi LLDIKTI; (c) hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian; (d) hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah; (e) hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah; (f) laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan; dan/atau (g) pemberitaan melalui media massa.

Untuk memudahkan laporan/pengaduan itu, Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik (Sidali) ini dibuat. Lewat sebuah sistem informasi, setiap pelapor dapat menyampaikan laporannya secara akurat dan bertanggung jawab serta dijamin kerahasiaannya, sedangkan Kementerian dapat merespons dan memberikan layanan secara transparan, terukur, dan akuntabel.

Untuk memberikan panduan secara praktis terhadap para pengguna Sidali, baik terhadap masyarakat pelapor, pihak perguruan tinggi selaku terlapor, LLDikti, maupun Dikti, Buku Panduan Sidali

ini disusun. Diharapkan panduan ini dapat menjadi pedoman yang praktis dan efektif bagi kepentingan pelaporan maupun penanganan.

Jakarta,

Plt. Dirjen Diktiristek.

NIZAM

1. Panduan untuk umum

A. Alamat Website SIDALI

Alamat website dari SIDALI ini sendiri ialah <https://sidali.kemdikbud.go.id>

B. Menu Home

Berikut tampilan Menu Home aplikasi SIDALI (Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik).

Version 2.13 - 2.12

Gambar 1. 1 Menu Home

C. Menu Buat Laporan

Berikut tampilan Menu Buat Laporan, sebagaimana pada gambar 1.2 *user public* dapat membuat laporan dugaan pelanggaran dengan mengisi *form* yang telah disediakan.

Identitas Pelapor

Nama Lengkap

Nomor Aktif*

Email

Alamat

Foto Kartu Identitas Tidak ada file yang dipilih
Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

Klik jika ingin merahasiakan identitas anda

Detail Laporan (wajib diisi)

Nomor Pelaporan

Perguruan Tinggi yang Dilaporkan

Jenis Pelanggaran

Keterangan Laporan

File Pendukung Tidak ada file yang dipilih
Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

Gambar 1. 2 Menu untuk membuat laporan dugaan pelanggaran oleh perguruan tinggi

- Langkah – langkah membuat laporan dugaan pelanggaran.
Klik ikon buat laporan untuk menampilkan halaman pengisian pembuatan laporan dugaan pelanggaran, sebagaimana pada Gambar 1.3.

SIDALI Home **Buat Laporan** Pemantauan

Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik

Layanan Pelaporan Pelanggaran Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Akademik

Disediakan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik

Buat Laporan **Pemantauan**

Panduan Pembuatan Laporan Pada Aplikasi SIDALI

0:00 / 2:40

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Login Menggunakan Akun PDDIKTI

Username *

Password *

Login

Data Statistik Pengunjung Bulan Mei 2023

Day	Visitors
1	1
2	3
6	1

DITBAGA SIAGA!

Version 2.13 - 2.12

Gambar 1. 3 Langkah - langkah membuat laporan dugaan pelanggaran

- Keterangan dan panduan pengisian identitas detail laporan.

The screenshot shows a web form with two main sections: 'Identitas Pelapor' and 'Detail Laporan (wajib diisi)'. The 'Identitas Pelapor' section includes fields for 'Nama Lengkap', 'Nomor ASIS*', 'Email', and 'Alamat'. It also features a 'Foto Kartu Identitas' field with a 'Pilih File' button and a checkbox for 'Jika ingin merahasiakan identitas anda'. The 'Detail Laporan' section includes fields for 'Nomor Pelaporan', 'Perguruan Tinggi yang Dilaporkan', 'Jenis Pelanggaran', and 'Keterangan Laporan'. It also has a 'File Pendukung' field with a 'Pilih File' button and a checkbox for 'Jika data yang anda laporkan sudah benar'. A 'Kirim Laporan' button is located at the bottom right. Red circles with numbers 1 through 13 point to various elements, and red boxes highlight the 'Pilih File' buttons and the 'Kirim Laporan' button.

Gambar 1. 4 Pengisian identitas dan detail laporan

- 1. Nama Lengkap Pelapor**
Isi formulir tersebut sesuai dengan kartu identitas pelapor.
- 2. Nomor yang dapat dihubungi**
Isi formulir tersebut dengan nomor telepon pelapor yang masih aktif.
- 3. Email**
Isi formulir tersebut dengan alamat email pelapor yang masih aktif.
- 4. Alamat**
Isi formulir tersebut dengan alamat pelapor yang sesuai dengan kartu identitas pelapor.
- 5. Foto kartu Identitas**
Klik ikon **Pilih File** untuk mengupload file berupa foto kartu identitas pelapor.
- 6. Checklist**
Jika pelapor ingin merahasiakan identitasnya, klik *checkbox* pada opsi tersebut.
 Klik jika ingin merahasiakan identitas anda
- 7. Nomor Pelaporan**
Pelapor akan mendapatkan nomor pelaporan secara otomatis setiap pelapor mengadukan pelanggaran.
- 8. Perguruan Tinggi yang Dilaporkan,**
Select, untuk memilih perguruan tinggi yang akan dilaporkan.
- 9. Jenis Dugaan Pelanggaran,**

Select, untuk memilih jenis dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan, daftar pelanggaran dapat dilihat pada [Daftar Pelanggaran](#)

10. **Keterangan Laporan**

Isi formulir tersebut dengan keterangan mengenai laporan yang dibuat.

11. **File Pendukung**

Klik ikon **Pilih File** untuk mengupload file pendukung mengenai laporan yang dibuat.

12. **Checklist**

Checklist jika laporan sudah dinyatakan benar dan sesuai.

Klik jika data yang anda laporkan sudah benar

13. **Kirim Laporan**

Klik ikon untuk mengirimkan laporan yang sudah dibuat oleh pelapor.

- Berikut contoh pengisian identitas dan detail laporan

The screenshot shows a web form with two main sections: 'Identitas Pelapor' and 'Detail Laporan (wajib diisi)'.
Identitas Pelapor section includes:
 - Nama Lengkap: [Redacted]
 - Nomor AKSI*: [Redacted]
 - Email: [Redacted]@mail.com
 - Alamat: [Redacted]
 - Foto Kartu Identitas: [Pilih File] Tidak ada file yang dipilih. Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb.
 - A checked checkbox: 'Klik jika ingin merahasiakan identitas anda'.
Detail Laporan (wajib diisi) section includes:
 - Nomor Pelaporan: 1506536203
 - Perguruan Tinggi yang Dilaporkan: Universitas [Redacted]
 - Jenis Pelanggaran: Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mengajar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi. [Close icon]
 - Keterangan Laporan: Perguruan tinggi tidak memiliki status
 - File Pendukung: [Pilih File] Tidak ada file yang dipilih. Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb.
 - A checked checkbox: 'Klik jika data yang anda laporkan sudah benar'.
 - A 'Kirim Laporan' button is located at the bottom right.

Gambar 1. 5 Contoh pengisian identitas dan detail laporan

D. Menu Pemantauan

Berikut tampilan Menu Pemantauan, sebagaimana pada gambar 1.6 *user public* dapat memantau perkembangan laporan yang dibuat dengan menginput nomor laporan dan nomor telepon pelapor yang dicantumkan pada saat pembuatan laporan.

Pemantauan

Nomor Laporan

Nomor Aktif

Lihat Pemantauan

Rekap Laporan

Tidak Ada Laporan

Acti
Go to

Gambar 1. 6 Lihat Hasil Pemantauan

- Keterangan dan panduan melihat hasil pemantauan

The screenshot displays a web interface for monitoring reports. It is divided into two main sections: 'Pemantauan' (Monitoring) and 'Rekap Laporan' (Report Summary).

Pemantauan Section:

- Contains two input fields: 'Nomor Laporan' (Report Number) and 'Nomor Aktif' (Active Number). Both fields are redacted with a red bar and marked with a circled '1' and '2' respectively.
- A 'Lihat Pemantauan' (View Monitoring) button is located on the right side, marked with a circled '3'.

Rekap Laporan Section:

- Header: 'Detail Laporan' (Report Details).
- Fields:
 - Nomor Laporan: [Redacted]
 - Nama Perguruan Tinggi: [Redacted]
 - Jenis Pelanggaran:
 - Perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke PDDIKTI
 - Pelanggaran lainnya
 - Keterangan Laporan: Laporan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Dibuat Pada: 4 April 2022
 - Status: [Ditubuhkembali DPKTI](#)
 - File Pendukung:
- Section: 'Pemantauan' (Monitoring).
- Date: 15 June 2022.
- User notification: 'Ligal 5 - Umum' (Membuat Laporan No. Laporan 0404346964 02:27).

Gambar 1. 7 Lihat Hasil Pemantauan

- 1. Nomor Laporan**
Isi formulir tersebut dengan nomor laporan yang didapatkan pelapor pada saat melakukan pelaporan.
- 2. Nomor yang dapat dihubungi**
Isi formulir tersebut dengan nomor telepon yang dicantumkan pelapor pada saat melakukan pelaporan.
- 3. Lihat Pemantauan**
klik ikon untuk menampilkan hasil pemantauan laporan.

2. Panduan untuk perguruan tinggi

User perguruan tinggi hanya dikhususkan dibuat kepada perguruan tinggi yang memiliki record laporan dugaan pelanggaran.

A. Menu *Home/Login*

Berikut tampilan Menu *Home*, sebagaimana pada gambar 2.1 user perguruan tinggi dapat *login* dengan menggunakan akun PDDIKTI dengan menginput **Username** dan **Password**.

Version 2.13 ~ 2.12

Gambar 2. 1 Menu *Home*

- Keterangan dan panduan untuk *login*

Gambar 2. 2 Pengisian *form login*

1. **Username**

Isi formulir tersebut dengan *username* pengguna.

2. **Password**

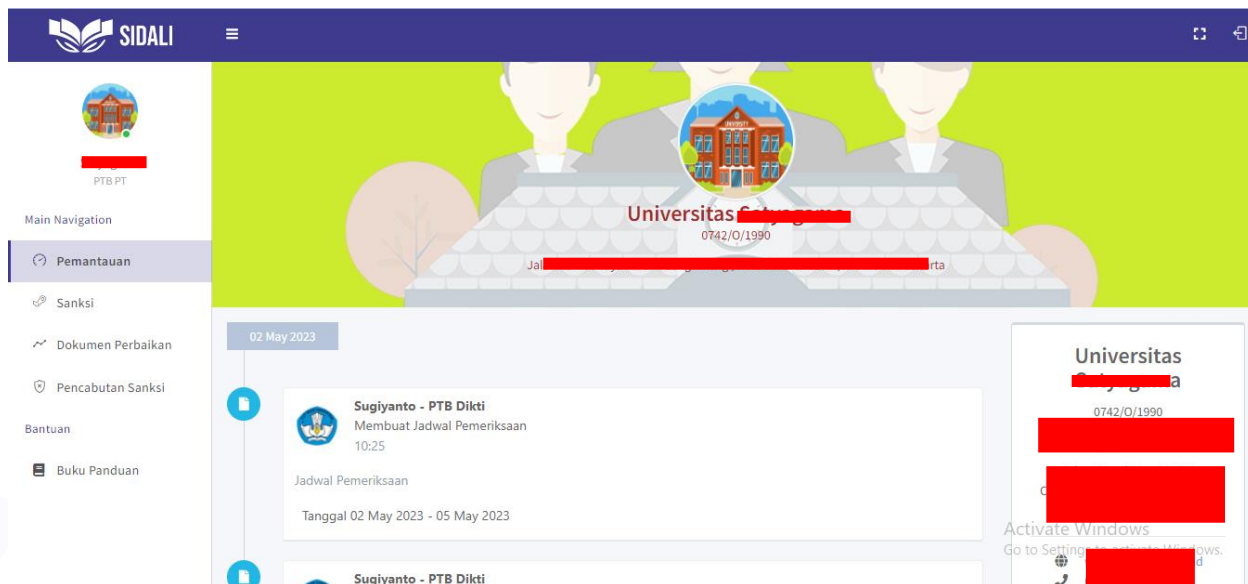
Isi formulir tersebut dengan *password* pengguna.

3. **Login**

Klik ikon untuk *login*.

B. Menu Pemantauan

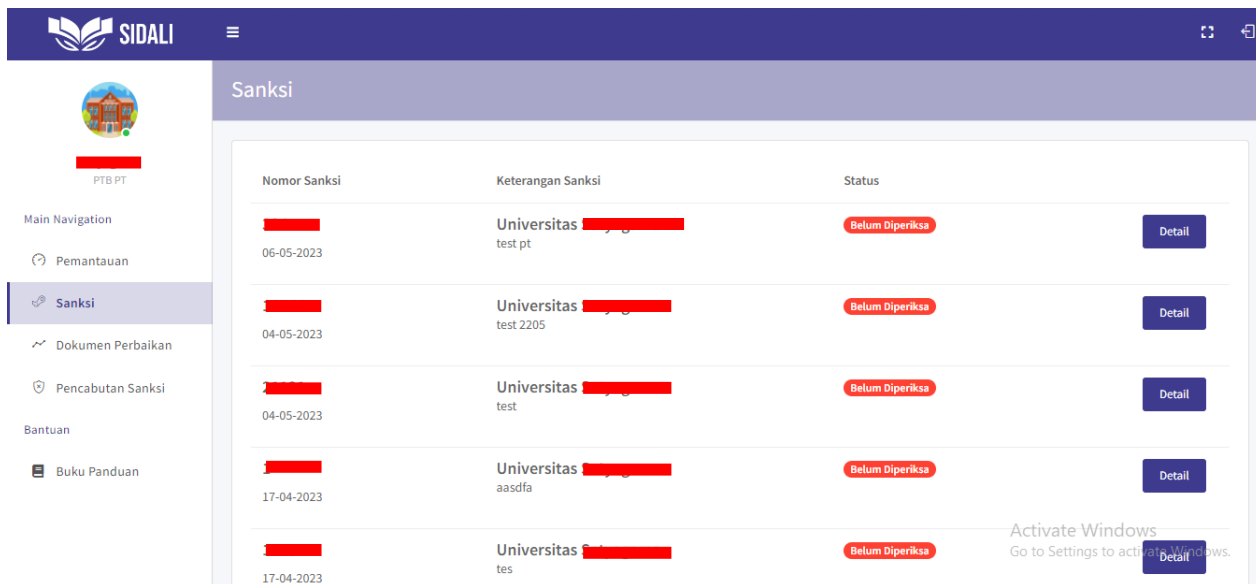
Setelah *login* akan diarahkan pada menu pemantauan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat memantau progres penanganan laporan dugaan pelanggaran, berikut tampilan menu pemantauan.



Gambar 2. 3 Menu Pemantauan

C. Menu Sanksi

Pada menu sanksi *user* perguruan tinggi mencakup *form* permohonan keberatan atas sanksi yang diberikan dan permohonan banding. Terhadap sanksi yang dikenakan, perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju. Jika perguruan tinggi tidak mengajukan keberatan, maka perguruan tinggi dapat langsung melakukan perbaikan dan menghentikan pelanggaran.



Gambar 2. 4 Menu Sanksi

1. Permohonan Keberatan

Berikut tampilan Menu Permohonan Keberatan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi yang diberikan dengan panduan berikut.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman detail sanksi.

Nomor Sanksi	Keterangan Sanksi	Status	Action
[Redacted]	Universitas [Redacted] test pt	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] test 2205	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] test	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] aasdfa	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] tes	Belum Diperiksa	Detail

Gambar 2. 5 Daftar Sanksi

- Klik tombol **Ya** bahwa perguruan tinggi ingin melakukan pengajuan permohonan keberatan.

TMT : 6 Bulan
Jenis Sanksi Administratif : Sedang

Keterangan : Berupa penurunan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi

Program profesi memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun

Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan

Keterangan : Penundaan pelaksanaan akreditasi

TMT : 6 Bulan
Jenis Sanksi Administratif : Sedang

Setelah membaca surat keputusan sanksi tersebut, Apakah Perguruan Tinggi bermaksud mengajukan keberatan?

Pengajuan dilakukan paling lambat tanggal 19 Mei 2023

Ya Tidak

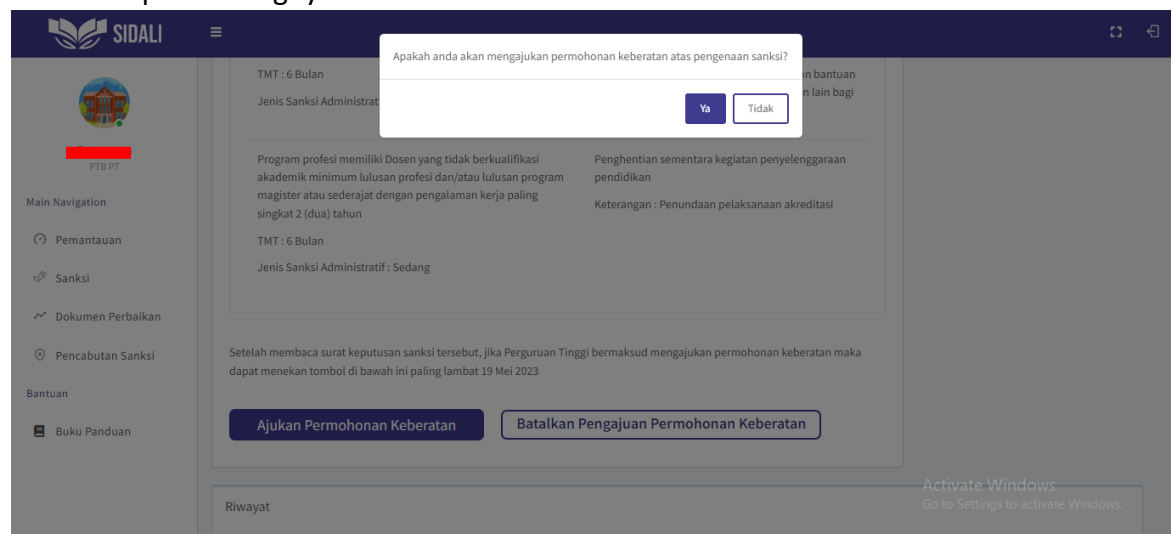
Gambar 2. 6 Pengajuan permohonan keberatan

- Klik tombol **Ajukan Permohonan Keberatan**, untuk mengkonfirmasi bahwa perguruan tinggi ingin melakukan pengajuan permohonan keberatan.

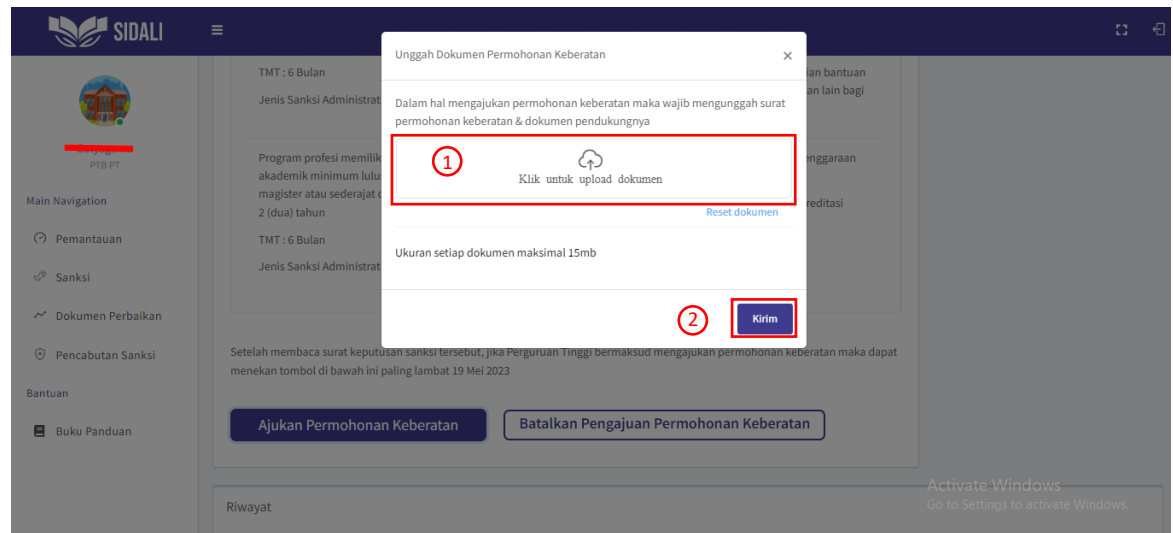


Gambar 2. 7 Konfirmasi pengajuan permohonan keberatan

- Pengunggahan surat permohonan keberatan mengenai sanksi administrasi dan dokumen pendukungnya.



Gambar 2. 8 Pop up pengajuan permohonan keberatan



Gambar 2. 9 Pengunggahan dokumen permohonan

1. **Klik untuk upload dokumen**

Klik kemudian unggah dokumen permohonan keberatan, berupa surat permohonan keberatan atas penetapan sanksi dan dokumen penyerta yang dianggap perlu.

2. **Kirim**

Klik ikon kirim untuk mengirim dokumen permohonan keberatan.

- Menunggu jawaban atas permohonan keberatan

The screenshot shows the 'Menunggu Jawaban Atas Permohonan Keberatan' page in the SIDALI system. The page includes a header with the SIDALI logo and a navigation menu on the left. The main content area displays the title 'Menunggu Jawaban Atas Permohonan Keberatan' and a central illustration of a person working at a computer. A sidebar on the right provides contact information for Universitas Satyagama, including its address, phone number, website, and email. Navigation buttons for 'Previous' and 'Next' are visible at the bottom.

Gambar 2.10 Menunggu jawaban atas permohonan keberatan

- Status laporan berubah setelah mengajukan permohonan atas keberatan

The screenshot shows the 'Sanksi' page in the SIDALI system. The page displays a table of sanctions with columns for 'Nomor Sanksi', 'Keterangan Sanksi', and 'Status'. The first row shows a sanction with the status 'Permohonan Keberatan' and a 'Detail' button highlighted with a red box. Other rows show sanctions with the status 'Belum Diperiksa'. The page also includes a navigation menu on the left and an 'Activate Windows' watermark at the bottom right.

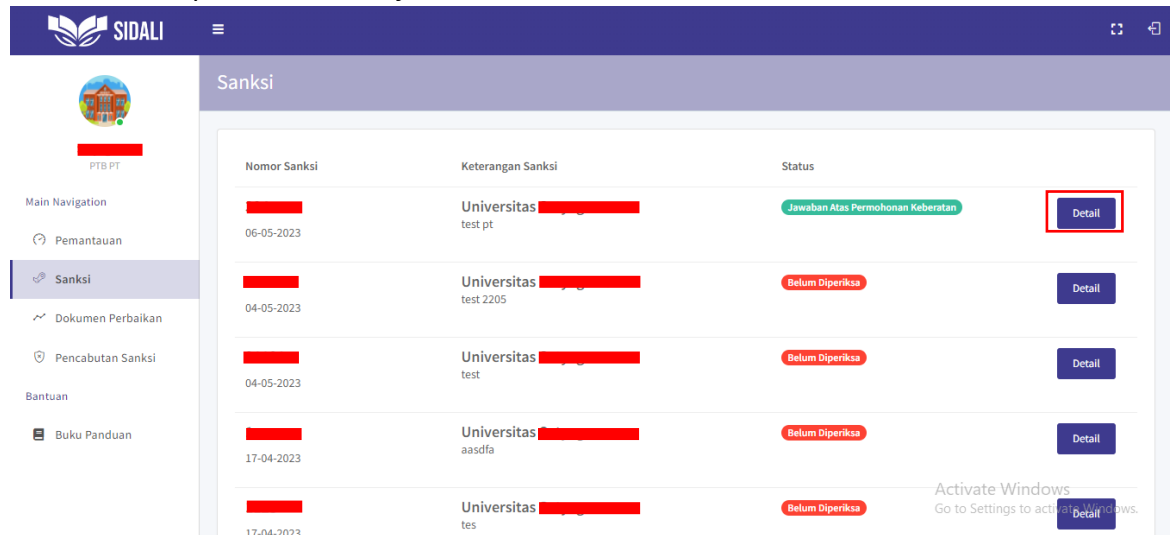
Nomor Sanksi	Keterangan Sanksi	Status
06-05-2023	Universitas S [redacted] test pt	Permohonan Keberatan
04-05-2023	Universitas S [redacted] test 2205	Belum Diperiksa
04-05-2023	Universitas S [redacted] test	Belum Diperiksa
17-04-2023	Universitas S [redacted] aasdfa	Belum Diperiksa
17-04-2023	Universitas S [redacted] tes	Belum Diperiksa

Gambar 2.11 Status laporan setelah mengajukan permohonan keberatan

2. Jawaban Keberatan

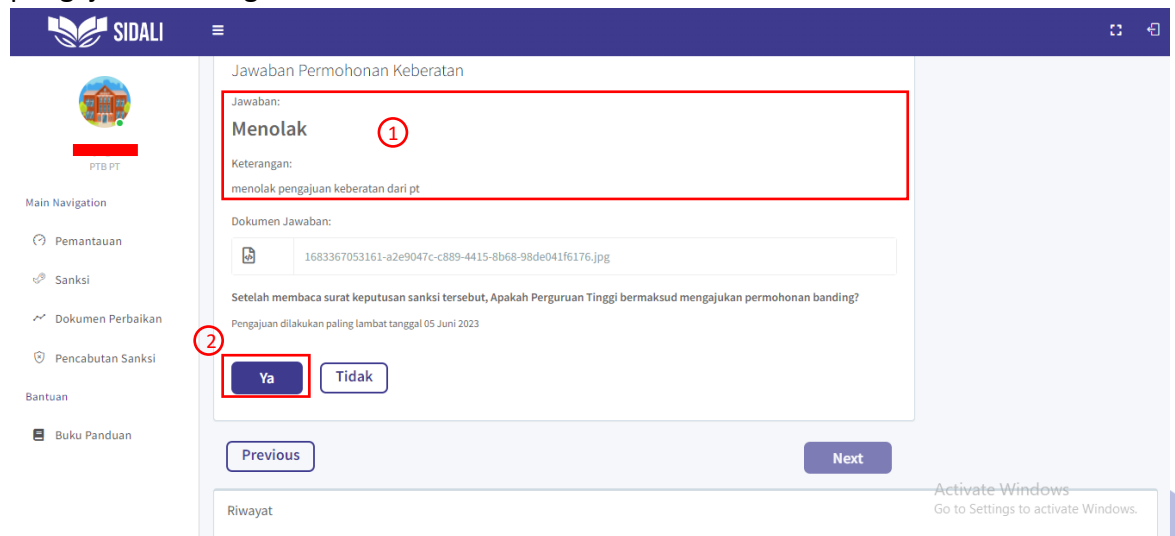
Berikut tampilan Jawaban Atas Permohonan Keberatan, sebagaimana pada gambar 2.10 user perguruan tinggi menunggu jawaban atas surat permohonan keberatan yang telah diajukan.

- Klik **Detail**, pada laporan yang berstatus 'Jawaban Atas Permohonan Keberatan' untuk menampilkan halaman jawaban keberatan.



Gambar 2.12 Laporan berstatus jawaban atas permohonan keberatan

- Halaman jawaban atas permohonan keberatan dan klik tombol **Ya** untuk pengajuan banding.



Gambar 2.13 Jawaban atas permohonan keberatan

1. Menerangkan hasil jawaban atas permohonan keberatan yang diusulkan.
2. Terhadap permohonan keberatan yang ditolak, *user* perguruan tinggi dapat mengajukan banding dan *upload* surat permohonan banding seperti pada permohonan keberatan. Klik **Ya**, untuk pengajuan banding kepada Direktorat Jenderal atau Menteri.

3. Jawaban Banding

Berikut tampilan Menu Jawaban Banding, pada menu ini *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat pengajuan banding yang telah diajukan.

- Klik **Detail**, pada laporan yang berstatus 'Jawaban Atas Permohonan Banding' untuk menampilkan halaman jawaban atas permohonan banding.

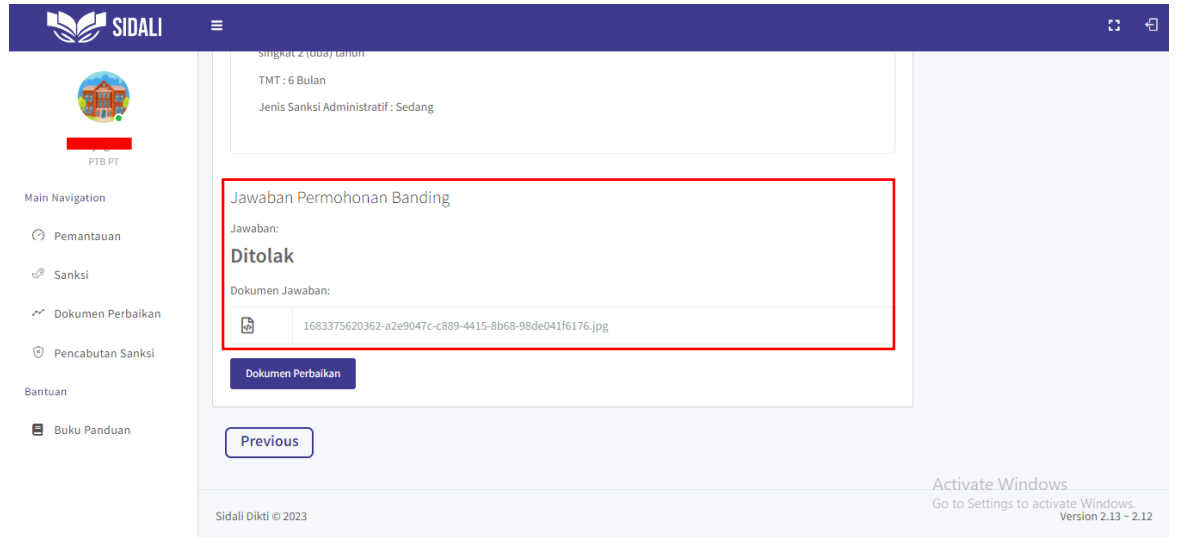
The screenshot shows the SIDALI Sanksi application interface. The main content area displays a table with the following data:

Nomor Sanksi	Keterangan Sanksi	Status	Action
[Redacted]	Universitas [Redacted] test pt	Jawaban Atas Permohonan Banding	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] test 2205	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] test	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] aasdfa	Belum Diperiksa	Detail
[Redacted]	Universitas [Redacted] tes	Belum Diperiksa	Detail

The 'Detail' button for the first row is highlighted with a red box. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Main Navigation', 'Pemantauan', 'Sanksi', 'Dokumen Perbaikan', 'Pencabutan Sanksi', 'Bantuan', and 'Buku Panduan'. The SIDALI logo is visible in the top left corner.

Gambar 2.14 Laporan berstatus jawaban atas permohonan banding

- Berikut tampilan halaman pernyataan jawaban banding.

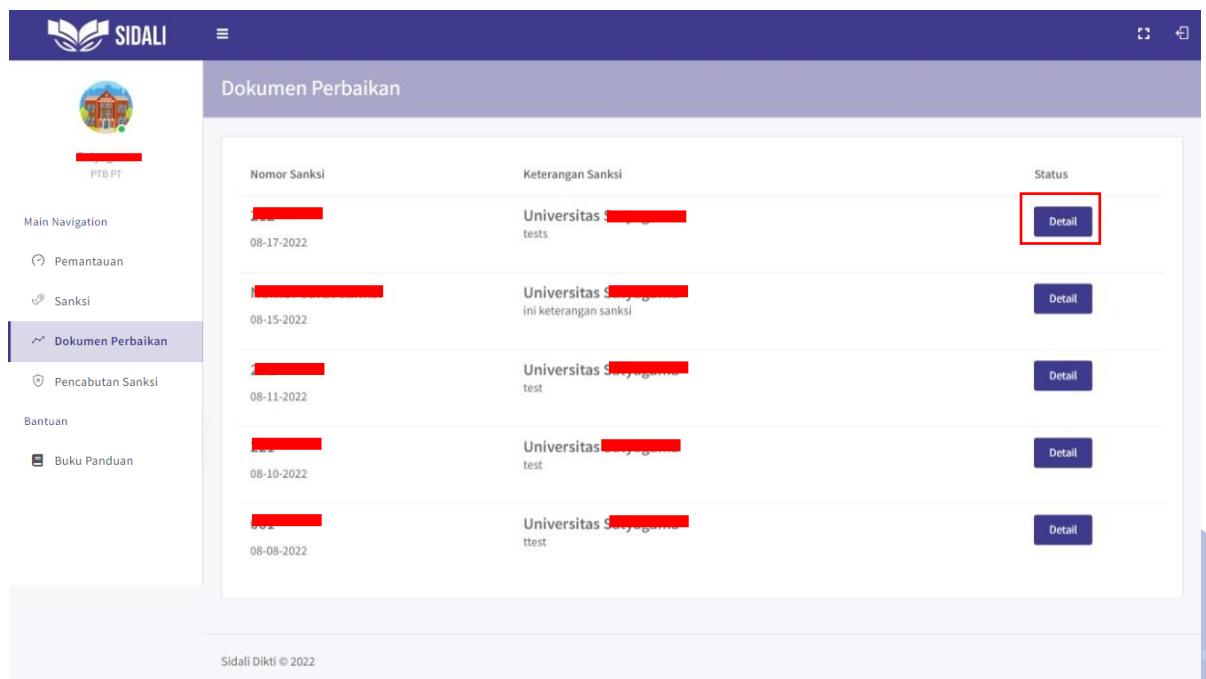


Gambar 2.15 Jawaban banding

D. Menu Dokumen Perbaikan

Berikut tampilan Menu Dokumen Perbaikan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengupload dokumen bukti adanya upaya perbaikan oleh perguruan tinggi dan bukti telah menghentikan pelanggaran.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman pengisian dokumen perbaikan.



Gambar 2.16 Menu Dokumen Perbaikan

- Keterangan dan panduan pengiriman dokumen perbaikan

SIDALI

PTB PT

Main Navigation

- Pemantauan
- Sanksi
- Dokumen Perbaikan**
- Pencabutan Sanksi
- Bantuan
- Buku Panduan

Universitas S [REDACTED]
0742/O/1990

Dokumen Perbaikan [← Kembali](#)

Detail Sanksi

Nomor Sanksi: [REDACTED]

Nama Perguruan Tinggi: Universitas S [REDACTED]

Keterangan: tests

Dibuat Pada: 17 August 2022

Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Peringatan Tertulis
TMT : 6 Bulan	Keterangan :
Jenis Sanksi Administratif : Ringan	

Universitas
[REDACTED]
0742/O/1990
Pembina: LLDIKTI III
[REDACTED]
Prov. D.K.I. Jakarta

[\[REDACTED\].ac.id](#)
[\[REDACTED\]](#)
[\[REDACTED\]](#)
[info.\[REDACTED\].id](#)

Dokumen Perbaikan

1 **Keterangan Dokumen:**

2 **Upload Dokumen:** Klik untuk upload dokumen [Clear files](#)

Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

3 **Kirim**

4 **Riwayat**

Show: 10 entries Search:

Tanggal	Keterangan	Dokumen
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries [Previous](#) [Next](#)

Sidali Dikti © 2022

Gambar 2.17 Menu Pengisian Dokumen Perbaikan

1. Keterangan Dokumen
Isi formulir tersebut dengan keterangan mengenai dokumen usaha perbaikan yang akan dikirim.
2. Drop files here to upload
Klik ikon untuk unggah dokumen perbaikan.
3. Kirim
Klik ikon untuk mengirim dokumen bukti usaha perbaikan.
4. Riwayat jika *user* perguruan tinggi sudah mengirim dokumen bukti usaha perbaikan.

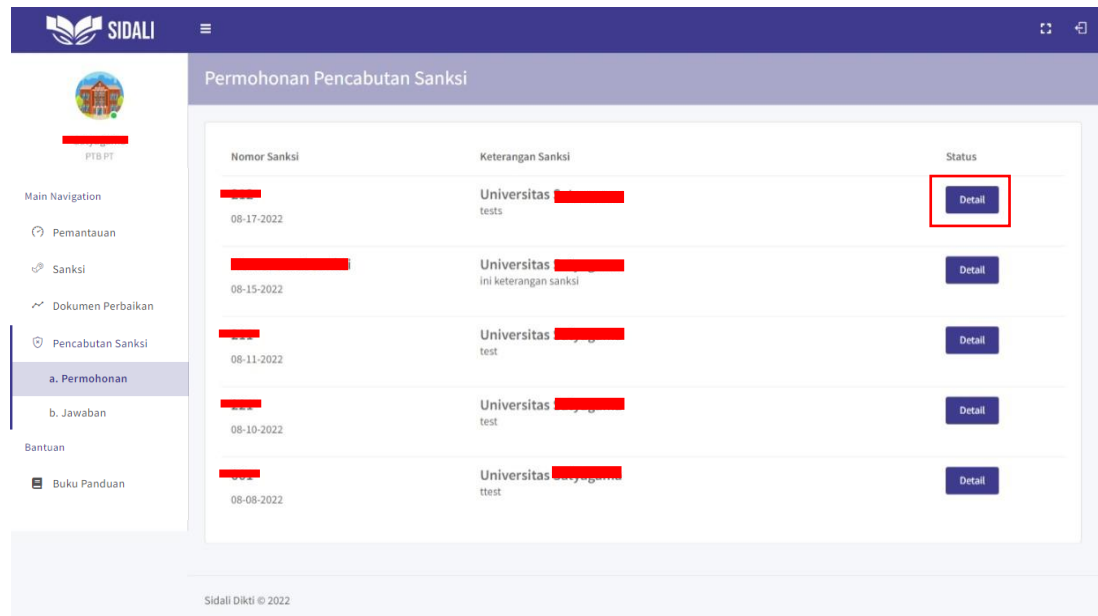
E. Menu Pencabutan Sanksi

Pada menu ini mencakup permohonan pencabutan sanksi oleh *user* perguruan tinggi

1. Permohonan

Berikut tampilan Menu Permohonan Pencabutan Sanksi, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi yang diberikan dengan panduan berikut.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan pencabutan sanksi



Gambar 2.18 Menu Permohonan Pencabutan Sanksi

- Keterangan dan panduan pengiriman surat permohonan pencabutan sanksi

The screenshot shows the 'Permohonan Pencabutan Sanksi' page in the SIDALI system. The page is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains navigation links: 'Main Navigation', 'Pemantauan', 'Sanksi', 'Dokumen Perbaikan', 'Pencabutan Sanksi', 'a. Permohonan', 'b. Jawaban', 'Bantuan', and 'Buku Panduan'. The main content area has a header with the SIDALI logo and a navigation menu. Below the header, there is a 'Detail Sanksi' section with the following information:

- Nomor Sanksi: [Redacted]
- Nama Perguruan Tinggi: Universitas [Redacted]
- Keterangan: tests
- Dibuat Pada: 17 August 2022
- Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png

Below the details is a table with two columns: 'Jenis Pelanggaran' and 'Sanksi'.

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Peringatan Tertulis
TMT : 6 Bulan	Keterangan :
Jenis Sanksi Administratif : Ringan	

At the bottom of the page, there is a 'Permohonan Pencabutan Sanksi' section with three numbered steps:

1. Upload dokumen: A red box highlights the 'Upload dokumen' area, which includes a text input field, a 'Klik untuk upload dokumen' button, and a 'Clear files' link.
2. Kirim: A red box highlights the 'Kirim' button.
3. Riwayat: A red box highlights the 'Riwayat' section, which includes a search bar, a table with columns 'Tanggal', 'Status', 'Keterangan', and 'Dokumen', and a 'Showing 0 to 0 of 0 entries' message.

Gambar 2.19 menu Permohonan Pencabutan Sanksi

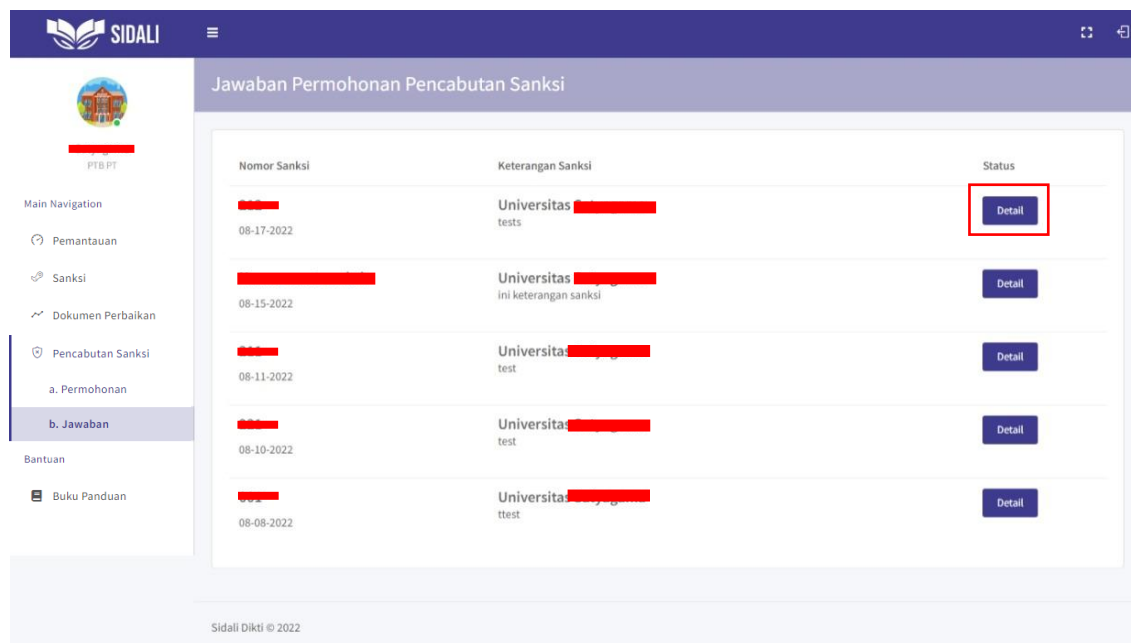
1. Drop files here to upload
Klik untuk unggah dokumen permohonan keberatan.
2. Kirim
Klik ikon kirim untuk mengirim dokumen permohonan keberatan.

- Riwayat jika *user* perguruan tinggi sudah mengirim surat Permohonan pencabutan Sanksi.

2. Jawaban

Berikut tampilan Menu Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi, pada menu ini *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat permohonan pencabutan sanksi yang telah diajukan.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan pencabutan sanksi.



Nomor Sanksi	Keterangan Sanksi	Status
08-17-2022	Universitas [redacted] tests	Detail
08-15-2022	Universitas [redacted] ini keterangan sanksi	Detail
08-11-2022	Universitas [redacted] test	Detail
08-10-2022	Universitas [redacted] test	Detail
08-08-2022	Universitas [redacted] ttest	Detail

Gambar 2.20 Menu Jawaban Permohonan Pencabutan sanksi

- Berikut tampilan halaman pernyataan jawaban permohonan pencabutan sanksi.

The screenshot shows the SIDALI web application interface. The main content area is titled "Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi". It is divided into two main sections: "Detail Sanksi" and "Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi".

Detail Sanksi:

- Nomor Sanksi: [Redacted]
- Nama Perguruan Tinggi: Universitas [Redacted]
- Keterangan: tests
- Dibuat Pada: 17 August 2022
- Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Peringatan Tertulis
TMT : 6 Bulan	Keterangan :
Jenis Sanksi Administratif : Ringan	

Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi:

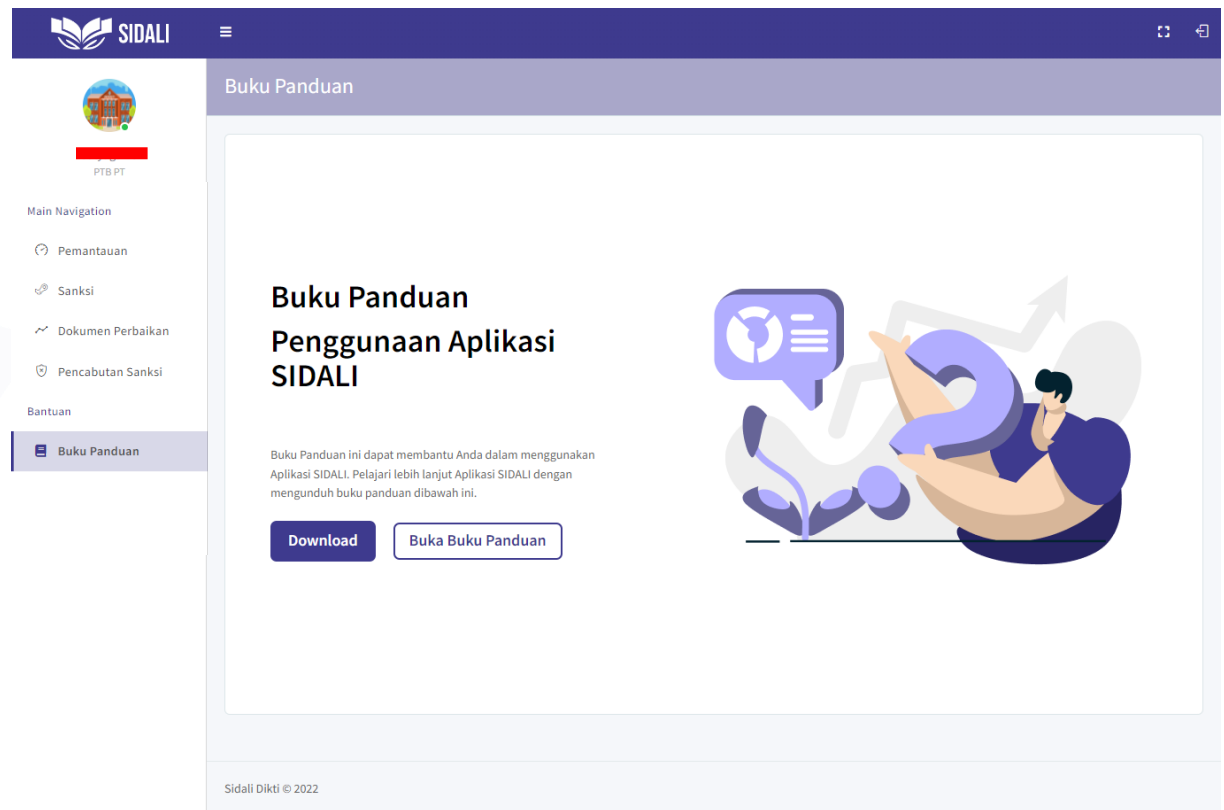
- Jawaban: **Rekomendasi Perbaikan**
- Keterangan: test
- Dokumen Jawaban: 1660724014133-WhatsApp image 2022-08-17 at 14.58.28.jpeg
- Perbaiki Dokumen

On the right side, there is a profile card for "Universitas [Redacted]" with contact information including phone number (0742/0/1990), email ([Redacted]@ac.id), and social media icons.

Gambar 2.21 Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi

F. Buku Panduan

Pada halaman ini *user* dapat melihat tampilan untuk mengunduh ataupun melihat buku panduan dari penggunaa Aplikasi SIDALI ini.



Gambar 2.22 Buku Panduan

5. Daftar Pelanggaran dan Sanksi

Berikut daftar Pelanggaran dan Sanksi

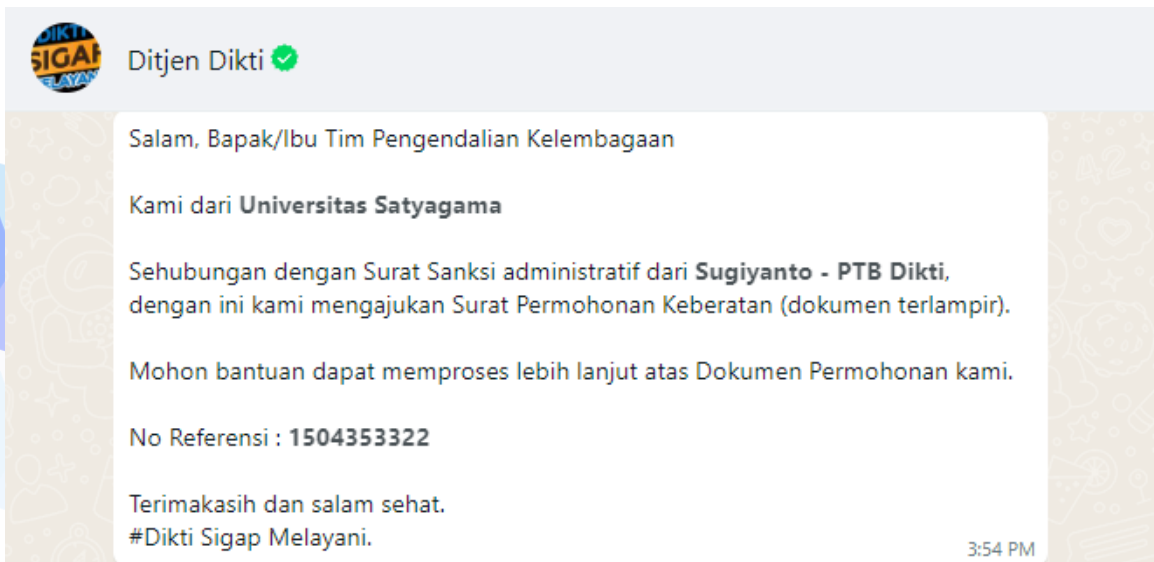
NO	Pelanggaran	Sanksi
1	Tidak Ada	Tanpa Sangsi
2	Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik,kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi	Peringatan Tertulis
3	Perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama,Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya	Peringatan Tertulis
4	Perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama	Peringatan Tertulis
5	Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum	Peringatan Tertulis
6	PTN tidak menerima calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa secara nasional	Peringatan Tertulis
7	PTN tidak mencari dan menjanging calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi	Peringatan Tertulis
8	Perguruan tinggi tidak memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik	Peringatan Tertulis
9	Perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia	Peringatan Tertulis
10	Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang non akademik	Peringatan Tertulis
11	Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Peringatan Tertulis
12	Perguruan tinggi memiliki Dosen tetap kurang dari 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi	Peringatan Tertulis
13	Perguruan tinggi tidak memenuh nisbah Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peringatan Tertulis
14	Perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi	Peringatan Tertulis

15	Program sarjana memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat	Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintahan pusat
16	Program magister memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
17	Program doktor memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
18	Program diploma memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
19	Program magister terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
20	Program doktor terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
21	Program profesi memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
22	Program spesialis memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
23	Perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
24	Perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki Sumber Belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
25	Perguruan tinggi tidak memiliki statuta	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
26	Perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
27	Perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke PDDIKTI	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
28	Perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
29	Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
30	Perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi	Penghentian pembinaan
31	Perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak	Penghentian pembinaan

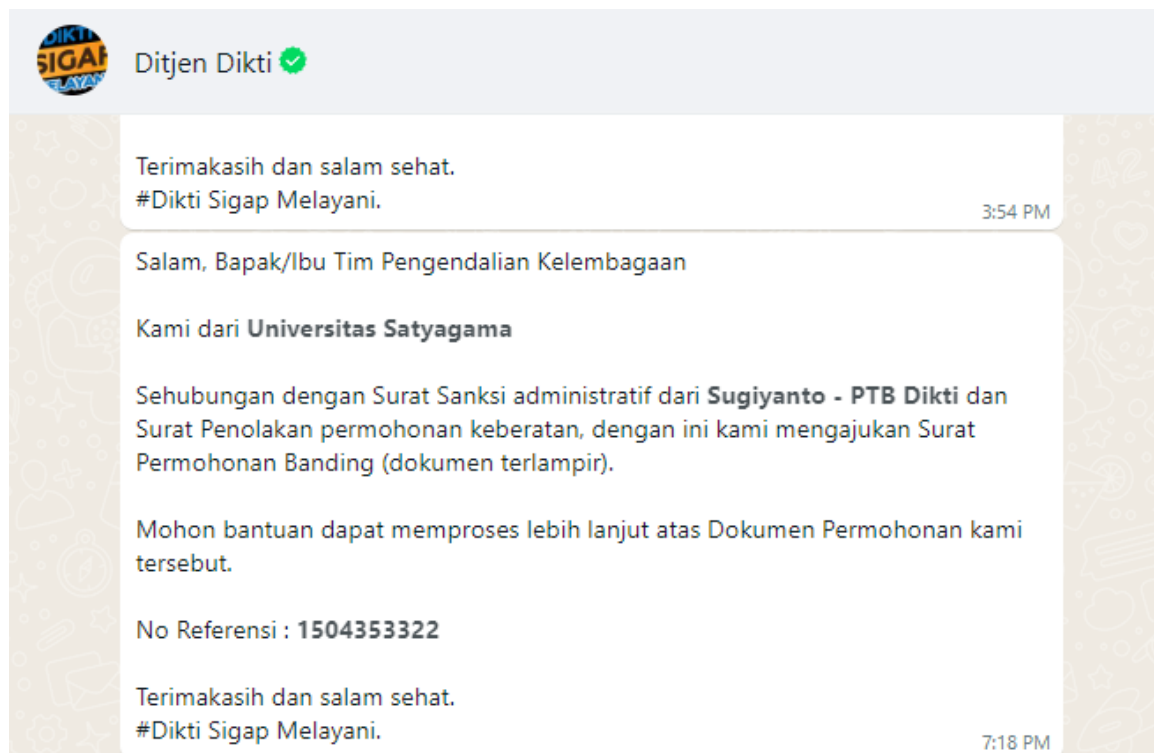
32	Perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	Penghentian pembinaan
33	Perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penghentian pembinaan
34	Perguruan tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru dengan tujuan komersial	Penghentian pembinaan
35	Pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba	Penghentian pembinaan
36	Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi Kampus Utama PTS tanpa izin dari Menteri	Pencabutan izin Program Studi
37	Perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
38	Perguruan tinggi menyelenggarakan PJJ tanpa izin dari Menteri	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
39	Perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
40	Terjadi sengketa	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
41	Pelanggaran Lainnya	Pelanggaran Lainnya

LAMPIRAN

Dokumentasi notifikasi WhatsApp



Gambar 3.1 Notifikasi *WhatsApp* Perguruan Tinggi Mengajukan Permohonan Keberatan



Gambar 3.2 Notifikasi *WhatsApp* Perguruan Tinggi Mengajukan Permohonan Banding

